BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, dari segi ekonomi yang berbasis pasar dimana pemerintah dan Bank Indonesia memiliki peranan yang penting. Menurut situs BI (2013) Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (*Inflation Targeting Framework*) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (*free floating*). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi *volatilitas* nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada tingkatan tertentu. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Makhijani (2010) dalam situs Bank Indonesia menjelaskan "sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional menghadapi tantangan ke depan berupa integrasi perekonomian regional, saat ini Bank Indonesia tengah melakukan kajian mengenai penyederhanaan dan penyetaraan nilai rupiah atau biasa disebut redenominasi". Mata uang Indonesia mempunyai pecahan terbesar saat ini yaitu Rp 100.000, uang rupiah tersebut merupakan mata uang terbesar kedua di dunia setelah mata uang terbesar saat ini yaitu Vietnam yang mencetak mata uang terbesarnya yaitu 500.000 Dong. karena pecahan rupiah yang terlalu besar maka Bank Indonesia merasa perlu untuk melakukan program redenominasi tersebut sehingga dapat menyederhanakan pembayaran dan juga efisiensi dalam

perhitungan sistem pembayaran. Contohnya jika pecahan yang berlaku sekarang Rp 100.000 maka setelah diberlakukan program redenominasi penulisan pecahannya diubah menjadi Rp 100 tanpa mengurangi nilai dari uang tersebut.

Redenominasi merupakan hal yang masih terdengar baru bagi masyarakat, begitu mendengar pengurangan nol, masyarakat langsung berpikiran redenominasi sama dengan sanering atau pemotongan mata uang sebagaimana kebijakan pemerintah di zaman Orde Lama yang menjadikan nilai uangnya akan berkurang. Sebagian masyarakat masih khawatir, kebijakan ini akan dimanfaatkan untuk memainkan harga. Kekhawatiran itulah yang harus menjadi perhatian Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjalankan program redenominasi tersebut, sehingga justru berakibat buruk pada perekonomian nasional, oleh karenanya pemerintah masih belum melaksanakan program ini karena masih banyak hal yang harus dikaji lagi, sehingga pemerintah dan Bank Indonesia sampai saat ini masih melakukan upaya konsultasi publik yang bertujuan untuk memberikan pengertian yang lebih baik tentang perubahan harga rupiah yaitu “redenominasi bukan sanering”.

Maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana proses pelaksanaan program redenominasi mata uang rupiah kepada masyarakat bisa sukses apabila diberlakukan, dengan wilayah yang luas dan terdiri atas belasan ribu pulau, tidak sedikit masyarakat yang tinggal di pelosok daerah, dan tingkat pendidikan masyarakat yang sebagian besar masih rendah. Oleh karena itu perancangan ini menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah dan Bank Indonesia dalam upaya melakukan konsultasi publik perihal pengenalan program redenominasi mata uang rupiah.

1.2 Identifikasi Masalah

Setelah latar belakang dipaparkan, terdapat beberapa masalah yang muncul antara lain:

- Program redenominasi mata uang rupiah saat ini masih dalam proses konsultasi publik.

- Persepsi masyarakat yang masih beranggapan bahwa redenominasi (penyederhanaan pecahan mata uang) itu sama dengan sanering (pemotongan nilai mata uang).
- Kekhawatiran masyarakat tentang kebijakan redenominasi rupiah akan dimanfaatkan untuk memainkan harga.
- Masyarakat belum mengetahui secara menyeluruh tentang teknis dari pelaksanaan program redenominasi mata uang rupiah.
- Belum adanya media informasi yang efektif tentang program redenominasi mata uang rupiah kepada masyarakat.

1.3 Rumusan Masalah

Dari hasil pemaparan diatas tersimpulkan bahwa program redenominasi di Indonesia masih terdengar baru bagi masyarakat, maka dari itu bagaimana merancang media informasi untuk tujuan pemberitahuan kepada masyarakat seputar pengetahuan umum tentang program redenominasi mata uang rupiah apabila diberlakukan menjadi rumusan masalah dalam perancangan ini.

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak terlalu meluas maka ditentukannya batasan masalah yang ada, perancangan di fokuskan kepada masyarakat khususnya yang mempunyai profesi sebagai pedagang kalangan menengah, karena para pelaku ekonomi menengah merupakan sektor yang terkena dampak langsung secara psikologis, dan merupakan sektor yang cenderung mempunyai kebiasaan berinteraksi yang tinggi. Sehingga memerlukan edukasi seputar program redenominasi mata uang rupiah, dan memungkinkan akan saling bertukar informasi anatara pedagang dan pembeli.

1.5 Tujuan Perancangan

Tujuan perancangan yang diambil yaitu sebagai berikut:

- Membantu pemerintah dan Bank Indonesia dalam melakukan konsultasi publik perubahan harga rupiah.

- Menyamakan persepsi masyarakat bahwa redenominasi itu berbeda dengan sanering.
- Menumbuhkan kepercayaan masyarakat bahwa program redenominasi itu aman.
- Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang teknis pelaksanaan program redenominasi sehingga tidak membingungkan masyarakat secara psikologis.
- Merancang media informasi untuk kebutuhan konsultasi publik program redenominasi mata uang rupiah yang efektif dan efisien.